

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Selama beberapa decade ini, Demokrasi sedang mengalami kemunduran. Prinsip-prinsip demokrasi mulai rontok pada beberapa negara. Hal ini menjadi gejala global. Demokrasi di Amerika Serikat, Hungaria, Rusia, Turki, dan sebagainya, mengalami turbulensi. Negara-negara di Asia Tenggara juga dinilai cenderung otoriter. Demokrasi Indonesia, dalam beberapa kajian, dianggap sedang mengalami kemunduran demokrasi.

Ada banyak hal yang menyebabkan kemunduran demokrasi di Indonesia. Kemunduran demokrasi terjadi karena keterlibatan militer dalam kehidupan sipil beberapa tahun belakangan. Oligarki yang semakin kuat merontokan prinsip-prinsip demokrasi. Isu politik identitas dan populisme yang berhembus kencang dalam pemilihan umum juga turut mempengaruhi kemunduran demokrasi. Hilangnya beberapa independensi beberapa lembaga negara semakin memperparah kemunduran demokrasi di Indonesia.

Waburton dan Aspinall menilai bahwa ada tiga penyebab kemunduran demokrasi di Indonesia, yakni aktor, struktur, dan pengabaian masyarakat. Aktor memainkan peran penting dalam merontokan prinsip-prinsip demokrasi. Aktor politik tidak mempunyai komitmen pada prinsip-prinsip demokrasi. Pada saat yang sama, struktur otoritarian Soeharto sepertinya masih diwariskan sampai rezim reformasi. Hal ini kemudian diperparah dengan pengabaian masyarakat terhadap nilai-nilai demokrasi.

Namun, bagaimana aktor politik bisa terus melanggengkan atau mewariskan rezim otoritarian di Indonesia? Kim Lane Scheppele menawarkan perspektif baru untuk bagaimana kemunduran demokrasi bisa terjadi di Indonesia. Kim Lane Scheppele menawarkan perspektif “legalisme otokrasi” untuk bisa memahami kemunduran demokrasi di Indonesia.

Kim Lane Scheppele tidak memberikan definisi yang final tentang legalisme otokrasi. Legalisme otokrasi, baginya, adalah praktik atau mekanisme

legal yang digunakan untuk menghancurkan hak sipil dan politik. Praktik legalisme otokrasi ini menghancurkan dua segmen penting dalam demokrasi, yakni hak sipil dan politik. Pengkisan hak sipil dan politik ini dilakukan secara legal, melalui hukum. Atas dasar itu, praktik legalisme otokrasi mempunyai kecenderungan untuk menciptakan kemunduran demokrasi.

Praktik legalisme otokrasi, menurut Kim Lane Scheppele, bermula dari *elected political leader* yang terpilih dalam pemilihan umum. Selanjutnya, *elected political leader* ini akan memanfaatkan hukum untuk melakukan perubahan-perubahan dalam kerangka otokrasi. Untuk memuluskan ini, *elected political leader* akan memperlemah lembaga-lembaga negara lain. Parlemen diperlemah melalui dominasi. Kemudian lembaga yudikatif juga diperlemah. Semua hal ini bertujuan untuk memperbesar kekuasaan eksekutif dan memperlemah proses *check and balance* dan menciptakan penumpukan kekuasaan pada *elected political leader*. Proses penumpukan ini dilakukan secara perlahan, melalui mekanisme hukum yang legal.

Praktik Legalisme otokrasi ini juga turut menciptakan kemunduran demokrasi di Indonesia. Praktik legalisme otokrasi membatasi hak sipil dan hak politik. Penulis menemukan bahwa praktik legalisme otokrasi di Indonesia bisa ditemukan dalam beberapa segmen hak sipil dan politik. Praktik legalisme otokrasi bisa ditemukan proses pemilu beberapa tahun belakangan, pembatasan kebebasan berbicara dan berpendapat, pengengakanan Pers, pelemahan oposisi, kegagalan fungsi pemerintahan, dan minimnya partisipasi politik.

Praktik legalisme otokrasi bisa ditemukan dalam proses pemilu. Sejak 2014, pemilu di Indonesia diwarnai oleh polarisasi, yang disebabkan oleh populisme. Dengan berkaca pada penelitian Defbry Margiansyah, pemimpin populis cenderung otokratis. Pemilu di Indonesia telah melahirkan *elected political leader*, yang dalam perspektif Kim Lane Scheppele, mempunyai kecenderungan otokrasi.

Kecenderungan otokrasi ini kemudian muncul dalam pelemahan oposisi. Dominasi koalisi pemerintahan di Parlemen menciptakan pelemahan *check and balance*. Praktik legalisme otokrasi selalu berusaha memperlemah *check and balance* untuk memperlancar tujuan-tujuan otoritarian. Tanpa pengawasan ketat

dari parlemen, pemerintah bisa “melegalkan” tujuan-tujuan otoritarian yang menciptakan kemunduran demokrasi.

Salah satu buktinya adalah pembatasan kebebasan berbicara, berpendapat, dan berorganisasi. UU No. 16 tahun 2017 bisa membatasi kebebasan masyarakat dalam berorganisasi. Produk hukum ini bersifat karet karena bisa digunakan untuk mengekang kebebasan berserikat. KUHP dan KUHP yang baru juga membatasi kebebasan berbicara dan berpendapat dengan melarang kritik atas pejabat pemerintah.

Selain itu, pembungkaman Pers juga menandai praktik legalisme otokrasi. Pembungkaman Pers tidak dilakukan melalui intimidasi dan pembredelan. Pembungkaman Pers dilakukan dengan pengendalian Pers. Kolongmerasi media dan UU ITE mempunyai indikasi pengendalian media. Kolongmerasi media dan UU ITE menumpulkan independensi dan daya kritis media. akibatnya, jurnalis dibayang-bayang dengan tekanan hukum dan media hanya menjadi alat politik pemilik media.

Praktik legalisme otokrasi juga muncul dalam fungsi pemerintahan. Fungsi pemerintahan berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi dan tuntutan akuntabilitas-transparansi. Sayangnya, fungsi pemerintahan di Indonesia gagal melakukan pemberantasan korupsi. Ia juga tidak menjamin transparansi dalam pembuatan hukum. kegagalan pemberantasan korupsi dilakukan melalui mekanisme legalisme otokrasi, di mana lembaga anti-korupsi dikendalikan untuk kepentingan politik.

Ironisnya, kegagalan fungsi pemerintahan ini tidak diiringi dengan menutup partisipasi publik. Pemerintah sering menggunakan narasi “antek asing” untuk mendelegitimasi kritikan. Pemerintah tampaknya tidak memahami kritikan sebagai bentuk partisipasi publik. Pemerintah tidak menggunakan kekerasan dan intimidasi untuk meredam kritik. Sebaliknya, kritik dilawan dengan menggunakan narasi “antek asing, seolah-olah semua bentuk kritik dimotivasi oleh kepentingan asing. Hal ini menunjukkan praktik legalisme otokrasi yang menutup partisipasi publik.

Dengan demikian, kemuduran demokrasi di Indonesia terjadi karena praktik legalisme otokrasi. Praktik legalisme otokrasi merusak kredibilitas pemilu, melemahkan oposisi, membungkam Pers, menginjak-injak kebebasan berbicara dan berorganisasi, mengagalkan fungsi pemerintahan, dan menutup ruang partisipasi publik.

4.2 Saran

Dalam rangka menpertegas demokrasi sekaligus menangkal kecendrungan otokrasi di Indonesia, penulis mengajukan beberapa saran. *Pertama*, penguatan masyarakat sipil. Pemilu 2014, 2019, dan 2024 harus menjadi pelajaran bahwa pemilu bisa mejadi sarana masuknya seorang pemimpin yang menjalankan praktik-praktik legalisme otokrasi. Atas dasar itu, masyarakat harus mempunyai kejelian politik untuk bisa mengenali pemimpin populis yang cenderung otoriter.

Selain itu, Partisipasi masyarakat tidak berhenti pada pemilihan umum. partisipasi masyarakat juga semakin penting dalam mengawasi berjalannya pemerintahan. Masyarakat harus berani membentuk gerakan untuk melawan pembatasan dan pelanggaran atas hak sipil dan politik masyarakat.

Kedua, peran aktif perguruan tinggi. Dalam sejarah Indonesia, mahasiswa dan kampus mempunyai andil dalam meruntuhkan rezim otokrasi. Rezim otokrasi Soekarno, yang diperhalus dengan demokrasi terpimpin, runtuh melalui demonstrasi mahasiswa. Otokrasi selanjutnya, rezim Soeharto, juga diruntuhkan oleh demonstrasi mahasiswa. Artinya, mahasiswa mempunyai peran besar dalam mengokohkan demokrasi di Indonesia. Mahasiswa menjadi kelompok terdepan untuk meruntuhkan otokrasi dan menegakan demokrasi. Oleh karena itu, peran kritis mahasiswa dituntut kembali pada zaman reformasi ini, untuk mengembalikan demokrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Primer

Scheppele, Kim Lane. "Rule of Law and The Frankenstate: Why Governance Checklist Do Not Work", *Governance*, 26:4, 2013.

------. "Not Your Father's Authoritarianism: The Creation of the Frankestate", *APSA: European Politics & Society*, Winter 2013.

------. "Autocratic Legalism", *The University of Chicago Law*, 85:2, 2018.

------. "Restoring Democracy through International Law", *American University International Law Review*, 39:4, 2024.

"*Curriculum Vitae Kim Lane Scheppele*", diterbitkan The Princeton School of Public and International Affairs pada July 2022.

Buku

Ananda, Diky dkk. *Lapora Evaluasi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Periode 2019-2024*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2024.

Asshiddiqie, Jimly. *Oligarki dan Totalitarianisme Baru*. Depok: Pustaka LP3ES, 2022.

------. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafitika, 2010.

Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*. Jakarta: PT Gramedia Utama, 2000.

Barton, Greg. *Biografi Gus Dur*. Yogyakarta: Noktah, 2020.

Dahl, Robert A. *Perihal Demokrasi*, Penerj. A. Rahman Zainuddin. Jakarta: Obor, 2001.

------. *Democracy and Its critics*. USA: Yale University, 1989.

Intania, Christina Clarissana. *Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang*. Jakarta: The Indonesiann Institute, 2024.

Jehalut, Ferdi. *Paradoks Demokrasi*. Yogyakarta: Penerbit Gunung Sopai, 2020.

Levistky, Steven dan Daniel Ziblatt. *Bagaimana Demokrasi Mati*, Jakarta: Granmedia, 2019.

Mallaranggeng, Rizal *Dari Langit: Kumpulan Esai tentang Manusia, Masyarakat, dan Kekuasaan*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008.

Masduki, dkk., *Kepemilikan dan Afiliasi Politik Media di Indonesia*. Yogyakarta: PR2Media, 2023.

Meyer, Thomas. *Demokrasi Sosial dan Libertarian: Dua Model yang Bersaing dalam Mengisi Demokrasi Liberal*. Jakarta: Friedrich Elbert Stiftung, 2005.

Mochtar, Zainal Arifin dan Muhidin M. Dahlan. *Kronik Otoritarianisme Indonesia: Dinamika 80 Tahun Ketatanegaraan Indonesia*. Sleman: EABooks, 2025.

Muhibbuddin, M. *Adolf Hitler: Pikiran, Tindakan dan Catatan-catatan Kelam Sang Diktator yang Disembunyikan*. Yogyakarta: Araska Publisher, 2020.

Sorensen, Goerg. *Demokrasi dan Demokratisasi*. Penerj. Tadjuddin Noer Effendi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Wijayanto, dkk. *Nestapa Demokrasi di Masa Pandemi: Refleksi 2020, outlook 2021*. Jakarta: LP3ES, 2021.

Winters, Jeffrey. *Oligarki*, Penerj. Zia Anshor. Jakarta: Gramedia, 2011.

Artikel Buku

Albertine Minderop, “Demokrasi dan Ancaman Integrasi” dalam Nasir Tamara, ed. *Demokrasi di Era Digital*. Jakarta: Obor, 2021.

Azra, Azyumardi. “Rekonsolidasi Demokrasi: Masyarakat Sipil, Budaya Politik, dan Infrastruktur Politik”, dalam Nasir Tamara, ed. *Demokrasi di Era Digital*, Jakarta: Obor, 2021.

Diamond, Larry. “Democratic Regression in Comparativ Perspective: Scope, Methods, and Cause”, dalam Aurel Croissant dan Jeffrey Haynes, ed. *Democratic Regressions in Asia*. London: Routledge, 2022.

Eve Waburton, “Deeping Polarization and Democratic Decline in Indonesia” dalam Thomas Carothers dan Andrew O’Donohue, ed. *Political Polarization in South and Southeast Asia*. Washington: Carnegie Endowment for International Peace, 2020.

Fossati, Diego. “Perpecahan Politik Islam dan Kemunduran Demokrasi di Indonesia”, dalam Wijayanto, Aisah Putri Budiatri, dan Herlambang P. Wiratraman, ed. *Demokrasi tanpa Demos*. Depok: LP3ES, 2021.

Haryanto, Ignatius. “Media, Demokrasi, dan Masyarakat Sipil: Antara Harapan dan Realitas”, dalam AE Priyono, ed. *Merannancang Arah Baru Demokrasi Indonesia Pasca-Reformasi*. Jakarta: KPG, 2014.

M. Amien Rais, “Demokrasi dan Sistem Politik”, dalam Prisma, *Demokrasi dan Proses Politik*. Depok: LP3ES, 1986.

Makshasin, Luthfy. "Islamisme dan Kemunduran Demokrasi di Indonesia: Problema dan Tantangan ke Depan" dalam Wijayanto, Aisah Putri Budiatri, dan Herlambang P. Wiratraman, ed. *Demokrasi tanpa Demos*. Depok: LP3ES, 2021.

Artikel Jurnal dan Seminar

Ansori, Lutfil. "Pembentukann Kabinet Koalisi dalam Sistem Presidensial Multi Partai di Indonesia", *Al-daulah: Jurnal Pidana dan Ketatanegaraan*, 12:2, 2023.

Aspinall, Edward dan Eve Waburton. "Indonesia: The Dangers of Democratic Regression", *Proceedings of Third International Conference on Social and Political Sciences (ICSPS 2017)*, DOI:10.2991/icspss-17.2018.1.

Correles, Javier. "The Authoritarian Resurgence: Autocratic Legalism in Venezuela", *Journal of Democracy*, 26:2, 2015.

Disporse, Raphael, Dave McRae, dan Vedi Hadiz, "Two Decade of Reformasi in Indonesia: Its Illiberal Turn", *Journal of Contemporary Asia*, 4:5, 2019.

Effendi, Orien. "Lemahnya Suara Partai Oposisi di balik Sistem Voting dalam Pengambilan Keputusan di Parlemen", *Politea: Jurnal Politik Islam*, 5: 1, 2022.

Farabi, Muhamad Fawwaz Farhan dkk. "Efektivitas Fungsi Pengawasan DPR di tengah Dominasi Koalisi Gemuk", *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, 5:2, 2025.

Farida, Alchansyah. "Analisa Yuridis Independensi Komosi Pemberantasan Korupsi sebaga Lembaga Ekstra Konstitusional dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, 4:1, Juni 2024.

Gerschewski, Johannes. "Erosion or Decay? Conceptualizing Causes and Mechanisms of Democratic Regression", *Democratization*, 28: 1, 2021, DOI: 10.1080/13510347.2020.182693

Hara, Abubakar Eby. "Populism in Indonesia and Its Threats to Democracy", Prasaran yang disampaikan pada *The International Conference on Social and Political Siences*, November 2017.

Huda, Mi'rojul dkk. "Democracy in Indonesia: From Democratic to Social Justice" dalam G. W. Pradana, *Proceedings of the 4th International Conference on Social Sciences and Law*. Berlin: Springer Nature, 2024.

Kacmarek, Przemyslaw. "Autocratic Legalism in the Perspective of the Role of Judges in Societies of New Democracies", *Acta Universitastis Wratislaviensies*, 29:44, 2023.

- Kendall-Taylor dan Erica Frantz, "Mimicking Democracy to Prolong Autocracy", *The Washington Quarterly*, 37:4, 2014.
- Lührmann, Anna dan Staffan I. Lindberg. "A Third Wave of Autocratization is Here: What is New About It", *Democratization*, 26:7, 2019.
- Maranja, Abdul Kahar. "Good Governance Sebagai Tolak Ukur untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan", *Jurnal Social dan Teknologi*, 2:11, 2022.
- Margiansyah, Defbry. "Otokratisasi dan Populisme Otoriter dalam Rezim Demokrasi: Perbandingan antara India, Hongaria, dan Turki, *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 11:2, 2019.
- Mietzer, Markus. "Fighting Illiberalism Whit Iliberalism: Islamist Populism and democratic deconsolidation in Indonesia", *Pacific Affairs*, 19:2, 2018.
- , "Flirting with Autocracy in Indonesia: Jokowi's Majoritarianism and Its Democratic Legacy", *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 44:3, 2025.
- Noor, Firman. "Oposisi dalam Kehidupan Demokrasi: Arti Penting Keberadaan Oposisi sebagai Bagian Penguatan Demokrasi di Indonesia, *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 42:1, 2016.
- Pramestisari, Nyoman Ayu Sukma dan Ni Luh Nyoman Kebayantini. "Eksistensi Organisasi Masyarakat Sipil dalam Dinamika Sistem Demokrasi di Indonesia", *Journal of Humanity Studies*, 1:1, Silampari, 2022.
- Pramitha, Diandra dan Adhi Cahya Fahadaya. "Media Massa dan Demokrasi di Indonesia: Studi tentang Afiliasi Politik Media Massa dalam Pemilu 2019-2024", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 9:3, 2024.
- Ramadhan, M. Fajar Shodiq dan Romel Masyukuri. "Kemunduran Demokrasi dan Kebebasan Pers di Asia Tenggara: Refleksi dari Enam Negara", *Jurnal Penelitian Politik*, 18:2, 2021. DOI: <https://doi.org/10.14103/jpp.v18i2.1028>.
- Silvia, Fabio de Sa e. "Good Bye, Liberal-Legal Democracy", *Law&Social Inquiry*, 48:1, 2023.
- Sinombor, Sonya Hellen. "Kedudukan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dalam Sistem Hukum di Indonesia", *Jurnal Al-Wasath*, 3:1, 2022.
- Varol, Ozan O. "Stealth Authoritarianism", *Iowa Law Authoritarianism*, 100:4, 2015.
- Waburton, Eve dan Edward Aspinall, "Explaining Indonesia's Democratic Regression: Structure, Agency, and Popular Opinion", *Contemporary Southest Asia: A Journal of International and Strategic Affairs*, 41:2, 2019.

Wahyu Dhyatmika, "Reformasi Media dan Pasang Surut Kebebasan Pers Pasca-1998", *Prisma*, 42:2, 2023.

Widodo, Bambang Eka Cahya dan Titin Purwaningsih. "Civil Societas and Issues of the Decline of Democracy in Indonesia", *Proceeding of the International Conference on Social and Politics (ICSP 2023)*. 19 Januari 2024.

Wulandari, Fanthika Ratna dkk. "Implikasi UU ITE Terhadap Kebebasan Pers di Indonesia", *Jurnal Hukum Progresif*, 8: 1, 2025.

Zaman, Ali Noer dkk. "Kemunduran Demokrasi: Analisis Bibliometrik Atas Data di Indeks Scopus Tahun 2010-2023", *Kajian Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta*, 5:2, November 2024.

Artikel Majalah

Abshar-Abdalla, Ulil. "Problem Kritik dalam Demokrasi Kita", *Kompas*, 1 Agustus 2024.

Adyatama, Egi. "Cara Lembaga Negara Mendukung dan Menghimpun Suara untuk Prabowo-Gibran", *Tempo*, 11 Februari 2024.

Girsang, Vendro Imanuel. "Riset EIU: Indeks Demokrasi Indonesia Masuk Kategori Flawed Democracy", *Tempo*, 7 April 2025.

Haryatmoko, "Legalisme Otokrasi Merongrong Pancasila", *Kompas*, 27 Maret 2025.

Javier, Faisal. "Berapa Kali Prabowo Menyebut 'Antek Asing'", *Tempo*, 5 Februari 2026.

Kamil, Irfan dan Dani Prabowo. "UU KPK Sebelum Revisi 2019 Dinilai jadi Kunci Perbaikan Kinerja", *Kompas*, 3 Februari 2026.
<https://nasional.kompas.com/read/2026/02/03/21491231/uu-kpk-sebelum-revisi-2019-dinilai-jadi-kunci-perbaikan-kinerja>

Lubis, Todung Mulia. "Pengadilan atau Penghukuman", *Kompas*, 10 Februari 2026.

Mochtar, Zainal Arifin "Seleksi dan Sekarat Independensi MK", *Kompas*, 29 Januari 2026.

Mochtar, Zainal Arifin. "Kekuasaan Tipu-Tipu" *Kompas*, 19 Februari 2026.

Muliawati, Anggi. "Istana Sebut Hasto-Tom Lembong: 2 Kasus ini Nuansanya Lebih Politik", *Detiknews*, 4 Agustus 2025.

Nababan, Willy Medi Cristian. "Susul PKB, Nasdem Bergabung di Barisan Pendukung Prabowo-Gibran", *Kompas*, 25 April 2024.

Ningtyas, Ika. “Penggunaan Narasi Antek Asing oleh Prabowo”, *Tempo*, 24 Maret 2025.

Nugraheny, Dian Erika dan Irfan Maullana, “Pakar: Omnibus Law Cipta Kerja Punya Semangat Sentralisasi Pemerintahan yang sangat kua”, *Kompas.*, 22 Januari 2022.
<https://nasional.kompas.com/read/2020/02/22/11295681/pakar-omnibus-law-cipta-kerja-punya-semangat-sentralisasi-pemerintahan-yang>

Pransiska, Lucky. “Jokowi Akui Cawe-Cawe untuk Kepentingan Bangsa”, *Kompas*, 30 Mei 2023.

Publikasi Elektronik

Abdurrahman, Sultan. “Alasan Partai Perindo Dukung Pemerintah Prabowo-Gibran”, *Tempo*, 16 Agustus 2024. <https://www.tempo.co/pemilu/alasan-partai-perindo-dukung-pemerintahan-prabowo-gibran-24345>

Albert, Richard. “Five Questions with Kim Lane Scheppele”, *I`CONnect*, 17 Agustus 2017. <https://joycevance.substack.com/p/five-questions-with-pricenton-professor>

Primandari, Fadhilah. “Indonesian Democracy takes another hit”, *EastAsiaForum*, 22 April 2025. <https://eastasiaforum.org/2025/04/22/indonesian-democracy-takes-another-hit/>

Putra, Bambang. “Konsensi Tambang: Usaha Kekuasaan Menjinakan Ormas Keagamaan”, *IndoProgress*, 29 Agustus 2024. <https://indoprogress.com/2024/08/konsensi-usaha-kekuasaan-menjinakan-ormas-keagamaan/>

Marx, Gary T. “Resensi Buku *Legal Secret: Equality and Efficiency in the Common Law*”, *Maghican Law Review*, 88:6, 1996. <https://web.mit.edu/gtmarx/www/legal.html>

Muliawati, Anggi “Istana Sebut Hasto-Tom Lembong: 2 Kasus ini Nuansanya Lebih Politik”, *Detiknews*, 4 Agustus 2025. <https://news.detik.com/berita/d-8044277/istana-soal-hasto-tom-lembong-2-kasus-ini-nuansanya-lebih-masalah-politik>

Sedaca, Nicole Bibbins. “What Is Democracy, and Why Does Defending It Matter?”, *Fredoom House*, 12 Agustus 2024. <https://freedomhouse.org/article/what-democracy-and-why-does-defending-it-matter>

Susanti, Bivitri. “Tiga Indikator *Autocratic Legalism* dalam Kebijakan Negara” hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-indikator-autocratic-legalism-dalam-kebijakan-negara-lt6102bdb6645ee/>.

- Siahaan, Jannus TH. “Menyoal dan Mengukur Demokrasi Kita”, *Kompas*, 8 Februari 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/0c8/05450061/menyoal-dan-mengukur-kualitas-demokrasi-kita>
- Winarta, Daniel. “Hari-Hari Terakhir Kebebasan Berpendapat Kita”, *LBH Jakarta*, 29 Desember 2025. <https://bantuanhukum.or.id/hari-hari-terakhir-kebebasan-berpendapat-kita/>
- Aliansi Jurnal Independen, “Kejanggalan Menteri Pertanian Amran Sulaiman Gugat Tempo Rp. 200 Miliar”, *Dewan Pers*, 16 September 2025. <https://aji.or.id/informasi/kejanggalan-menteri-pertanian-amran-sulaiman-gugat-tempo-rp-200-miliar>
- Dewan Pers, “Catatan Akhir Tahun Dewan Pers 2025: Kemerdekaan Pers Terancam, Profesionalisme dan Ekonomi Media Jadi Tantangan Serius”, *Dewan Pers*, 30 Desember 2025. <https://dewanpers.or.id/read/news/30-12-2025-catatan-akhir-tahun-dewan-pers-2025-kemerdekaan-pers-profesionalisme-dan-ekonomi-media-jadi-tantangan>
- Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian RI, “Menteri-menteri Koordinator Bidang Perekonomian”, diakses pada 10 Februari 2026. <https://www.ekon.go.id/profil/menteri-menteri>
- The Princeton School of Public and International Affairs, “Scheppele Named Winner of Service by Law and Society Association”, *Departemen of Sociology*, 12 Mei 2020. <https://sociology.princeton.edu/news/scheppele-named-winner-service-award-law-and-society-association>
- YLBHI, KontraS, LBH Jakarta, AJI, Yayasan Lokataru, Amnesty, dan LBH Pers, “Temuan Awal Pemantauan Bersama Pristiwa Mei 2019 di Jakarta”, *LBH Jakarta*, 30 Mei 2019. <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/temuan-awal-pemantauan-bersama-pristiwa-mei-2019/>